

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis terkait evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pendidikan inklusif tahun 2015-2016 dari enam indikator pelaksanaan evaluasi kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas

a. Kejelasan Tujuan Suatu Program

Nilai efektivitas yang diukur dari kejelasan tujuan suatu program kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mencapai tujuan program sudah efektif, terbukti dengan adanya regulasi yang jelas dan sesuai, dengan bentuk Peraturan Walikota No 47 tahun 2008 tentang penyelenggara pendidikan inklusi.

b. Target Capaian dalam Menjalankan Program

Nilai efektivitas yang diukur dari Target Capaian dalam Menjalankan Program, Kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta cukup efektif dalam merealisasikan indikator kinerja, dimana ada dua indikator kinerja yaitu persentase jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusi dan angka melek huruf yang mencapai target. Adapun manfaatnya dapat mengurangi angka putus sekolah.

2. Efisiensi

a. Sumber Daya Manusia yang Tersedia dalam Menjalankan Program

Evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta, sudah efisien hal ini didukung dengan adanya sumber daya manusia yaitu dengan adanya guru pendamping khusus di setiap sekolah inklusi, dimana dalam meningkatkan kualitas GPK, Dinas Pendidikan mengadakan *workshop* sebanyak dua kali. Hal tersebut, menjadi terobosan untuk guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, bisa menjadi GPK bagi ABK di sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi.

b. Dana yang Digunakan dalam Pelaksanaan Program

Dana yang digunakan untuk pelaksana program pendidikan inklusif sumbernya sudah ada dan jelas berasal dari APBD Kota Yogyakarta, akan tetapi untuk pembagiannya masih kurang merata di setiap sekolah-sekolah.

c. Sumber Daya Peralatan yang Mendukung Pelaksanaan Program

Dalam pemenuhan sumber daya peralatan yang mendukung pelaksanaan program pemerintah melakukan diklat, pelatihan ABK, *assesment* ABK pihak dinas masih dapat memenuhi, akan tetapi untuk penyediaan bangunan fisik seperti gedung-gedung sekolah yang ramah disabilitas masih belum terpenuhi.

3. Kecukupan

Ketersediaan fasilitas yang diberikan dalam suatu program tercukupi merupakan salah satu bentuk pelayanan suatu organisasi, yang mendukung dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang berperan dalam menjalankan program pendidikan inklusi dengan menyediakan fasilitas kurikulum khusus ABK, Kegiatan Pendidikan Inklusi, dan Adanya *Resource Center*. Akan tetapi dari ketiga parameter tersebut masih banyak yang perlu untuk ditingkatkan maupun ditambah, karena hal ini menyangkut kebutuhan ABK dalam proses belajar di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

4. Pemerataan

Keadilan pelayanan program pendidikan inklusi yang didistribusikan secara merata. Untuk jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dibilang sudah merata, karena adanya representasi sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi berdasarkan jenjang strata di Kota Yogyakarta. Sedangkan jumlah siswa inklusi dan GPK yang tidak sesuai, mengakibatkan terus adanya kesenjangan antara jumlah GPK dan ABK tiap tahunnya, hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan program tidak merata dan manfaat yang didapatkan kelompok sasaran tidak maksimal.

5. Responsivitas

Secara reaksi dan tanggapan dari kelompok sasaran dalam menjalankan program pendidikan inklusif sudah berjalan dengan baik akan tetapi dari segi faktor pendukung berupa sarana prasarana yang digunakan masih kurang memadai, namun respon dan penyelesaian dinas pendidikan dalam menjalankan program ini sudah cukup baik, yaitu pada respon pegawai terhadap keluhan, tersedianya banyak akses baik secara *online* dan *offline* yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan serta informasi yang didapatkan dari pengaduan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan. Serta mengkaji secara mendalam terkait permasalahan yang ada dimasyarakat khususnya pendidikan inklusi.

6. Ketepatan

program pendidikan inklusi ini memiliki banyak manfaat untuk anak berkebutuhan khusus yang dapat memicu perubahan pada perkembangan sikap, tidak ada lagi rasa takut, dapat mawas diri. Adanya pendidikan inklusi ini sangat bermanfaat untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) tidak hanya dari segi akademik melainkan mental dan sikap dalam bersosialisasi terhadap masyarakat.

Kesimpulan secara umum, terkait evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pendidikan inklusi tahun 2015-2016 diukur menggunakan enam indikator. Setelah dilakukannya analisis dan data yang didapatkan di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas

Pendidikan Kota Yogyakarta hanya berhasil di dua indikator dan tidak berhasil di keempat indikator yang ada. Hal ini disimpulkan berdasarkan, hasil keseluruhan yang telah diukur dengan indikator serta parameter yang digunakan peneliti dalam mengevaluasi.

Keberhasilan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dalam mewujudkan pendidikan inklusi tahun 2015-2016 yaitu pada indikator efektivitas, dikarenakan kedua parameter yang digunakan peneliti, telah terpenuhi. Pada indikator ketepatan di rasa sudah cukup, dikarenakan ada manfaat untuk ABK setelah menerapkan program pendidikan inklusi. Untuk keempat indikator yang tidak berhasil, hal ini bukan berarti keempat indikator tidak dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, melainkan ada parameter yang belum dapat terpenuhi di setiap indikator. Maka dari itu, evaluasi kinerja untuk Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta perlu dilakukan, hal ini menyangkut dengan indikator kinerja yang belum dapat terpenuhi pada program pendidikan inklusi.

Dari ketiga sekolah yang dijadikan *sample* dalam penelitian ini, yaitu SD N Giwangan Kota Yogyakarta, SMP N 15 Kota Yogyakarta dan SMP Muhammadiyah 9 Kota Yogyakarta. Dapat disimpulkan bahwa sekolah yang terbaik dan sudah layak menjadi sekolah inklusi yaitu SD N Giwangan Kota Yogyakarta. Dilihat dari beberapa aspek pendukung di sekolah tersebut yang sudah memenuhi kriteria sebagai sekolah inklusi. Seperti infrastruktur yang telah memadai yaitu adanya tangga yang ramah disabilitas, trotoar *guiding block*, WC duduk, dan lainnya.

B. Saran

1. Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi harus mendukung pendidikan inklusi dari guru reguler, LSM sampai dengan orang tua siswa inklusi.
2. Perlu adanya penambahan kualitas dan jumlah guru pendamping khusus serta perlu memperhatikan terkait dengan insentif yang GPK terima.
3. Penambahan dana secara merata ke semua sekolah inklusi untuk perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana agar mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi dan dapat menjadi program yang berkelanjutan.
4. Diperlukannya Peraturan Daerah untuk penyandang difabilitas, dengan tujuan mempermudah penyandang difabilitas memperoleh hak-haknya.
5. Perlu adanya sinergitas yang baik antara Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Lembaga Swadya Masyarakat dan Universitas yang terlibat dalam mewujudkan pendidikan inklusi.
6. Perlu adanya upaya meningkatkan pihak-pihak untuk terlibat dan berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta, dengan tujuan agar semua sekolah inklusi terpenuhi sarana dan prasarannya serta layak disebut inklusi.